

RINGKASAN

Arif Sutarso, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Dosen Pembimbing: Ketua Dr. Ari Tri Wibowo, S.H., M.H., anggota Siti Rohmah, S.H., M.H.

Penelitian ini berjudul “Akibat Hukum Pemerintah Desa Dalam Penerbitan Surat Keterangan Tanah Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Di Kabupaten Banyumas)” yang bertujuan untuk 1.) mengetahui akibat hukum surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh pemerintah desa sebagai dasar peralihan hak atas tanah. 2.) mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan akibat penerbitan Surat Keterangan Tanah yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif empiris dengan pendekatan sosiologis hukum dan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan perangkat desa, dan PPAT Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKT yang diterbitkan oleh pemerintah desa hanya berfungsi sebagai dokumen administrasi dan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan maupun dasar peralihan hak atas tanah.

Penggunaan SKT sebagai dasar peralihan hak dapat menimbulkan akibat hukum administrasi, perdata, dan pidana. Praktik di Desa Wiradadi, Karangnanas, dan Karangrau menunjukkan bahwa penyalahgunaan SKT masih berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi upaya administrasi, perdata, dan pidana. Selain itu, peningkatan pemahaman hukum aparatur desa, penguatan pengawasan administrasi pertanahan, dan koordinasi dengan instansi terkait menjadi langkah preventif untuk mencegah sengketa pertanahan.

Kata Kunci: Peralihan Hak Atas Tanah, Akibat Hukum, Upaya Hukum

SUMMARY

Arif Sutarso, Law Study Program, Nahdlatul Ulama University, Purwokerto. Supervisors: Chairperson Dr. Ari Tri Wibowo, S.H., M.H., member Siti Rohmah, S.H., M.H.

This research, entitled "Legal Consequences of Village Governments in Issuing Land Certificates as the Basis for Transferring Land Rights (A Study in Banyumas Regency)," aims to: 1.) determine the legal consequences of land certificates issued by village governments as the basis for transferring land rights. 2.) determine the legal remedies available to parties harmed by the issuance of Land Certificates that do not comply with statutory provisions.

The research method used is an empirical normative legal method with a sociological legal approach and a statutory approach. Data were obtained through literature review, interviews with village officials, and Land Deed Officials (PPAT) in Sokaraja District, Banyumas Regency, and were then analyzed descriptively.

The results of this study indicate that the Land Certificate (SKT) issued by village authorities functions solely as an administrative document and does not have legal force as proof of land ownership or as a valid basis for the transfer of land rights. The use of SKT as the basis for the transfer of land rights may result in administrative, civil, and criminal legal consequences. Practices in Wiradadi, Karangnanas, and Karangrau Villages show that the misuse of SKT still has the potential to cause land disputes and legal uncertainty. Legal remedies available to affected parties include administrative, civil, and criminal actions. Furthermore, improving the legal understanding of village officials, strengthening land administration supervision, and enhancing coordination with relevant institutions are important preventive measures to minimize future land disputes.

Keywords: Transfer of Land Rights, Legal Consequences, Legal Remedies